

**STRATEGI IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DI
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

M. ALDI MUNTHE

NIM. 220802091

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Aldi Munthe

NIM : 220802091

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Tempat/Tanggal Lahir: Subulussalam 05 Mei 2004

Alamat : Teuku Umar, Simpang Kiri, Subulussalam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2026

Yang Menyatakan,



M. Aldi Munthe
NIM. 220802091

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
STRATEGI IMPLEMENTASI KEGIATAN WAJIB BELAJAR DI
KABUPATEN ACEH SINGKIL

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

M. Aldi Munthe

NIM.220802091

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I


Prof. Dr. Muji Mulla S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

Pembimbing II


Zakki Fuad Khalil, M.Si.
NIP. 199011192022031001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
STRATEGI IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DI KABUPATEN
ACEH SINGKIL

M. ALDI MUNTHE

NIM.220802091

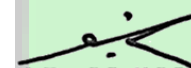
Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu
Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2026

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. Muji Mulia M. Ag..

NIP. 197403271999031005


Zakki Fuad Khalil, M.Si.

NIP. 199011192022031001

Penguji 1,

Penguji 2,


Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si.

NIP. 196110051982031007


Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P

NIP. 199407072025051005

Mengenai,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Muji Mulia M. Ag.

NIP. 197403271999031005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Selawat dan Salam penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: **“Strategi Implementasi Wajib Belajar Di Kabupaten Aceh Singkil”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Muazzinah, M.P.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Zakki Fuad Khalil, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, masukan dan motivasi dalam pembuatan proposal ini.
6. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, saran, serta ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
7. Zakki Fuad Khalil, M.Si., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Ranry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Kedua orang tua, keluarga, dan teman-teman terima kasih atas doa, nasehat dan mendukung, serta kasih sayang yang selalu diberikan.

Banda Aceh,

M. Aldi Munthe
NIM. 220802091



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
Abstrak.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Kajian Teori	8
2.1.1. Kebijakan Publik.....	8
2.1.2. Strategi Kebijakan.....	9
2.1.3. Strategi Implementasi Kebijakan.....	11
2.1.4. Program Wajib Belajar	17
2.2. Penelitian Terdahulu	19
2.3. Kerangka Berpikir	32
BAB III.....	33
METODOLOGI PENELITIAN.....	33
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
3.2. Lokasi Penelitian	34
3.3. Sumber Data.....	34
3.3.1. Data Primer	34
3.3.2. Data Sekunder	35
3.4. Fokus Penelitian	35
3.5. Informan Penelitian.....	35
3.6. Teknik Pengumpulan Data	36

3.6.1. Observasi.....	36
3.6.2. Wawancara.....	37
3.6.3. Dokumentasi.....	37
3.7. Teknik Analisis Data	37
3.7.1. Reduksi Data	37
3.7.2. Penyajian Data	38
3.7.3. Penarikan Kesimpulan.....	38
BAB IV	39
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Singkil.....	39
4.1.1. Kondisi Pendidikan.....	40
4.1.2. Peran Dinas Pendidikan.....	41
4.1.3. Peran Cabang Dinas Pendidikan.....	42
4.2. Hasil Penelitian	43
4.2.1 Strategi Implementasi Program Wajib Belajar	43
4.2.1.1. Komunikasi	44
4.2.1.2. Sumber Daya.....	48
4.2.1.3. Disposisi atau Sikap Pelaksana.....	51
4.2.1.4. Struktur Birokrasi	54
4.2.2. Tantangan dan Hambatan Implementasi Program Wajib Belajar	55
4.2.2.1. Aksesibilitas: Jarak, Kondisi Jalan, dan Transportasi.....	55
4.2.2.2. Faktor Ekonomi: Tingkat Kemiskinan Tergolong Tinggi	57
4.2.2.3. Sumber Daya Manusia: Keterbatasan dan Pemerataan Guru.....	59
BAB V.....	61
PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR LAMPIRAN.....	68

Abstrak

Penelitian ini fokus pada belum optimalnya pelaksanaan program wajib belajar di Kabupaten Aceh Singkil. Masalah ini terlihat dari terbatasnya akses pendidikan, kondisi geografis dan infrastruktur yang menyulitkan sebagian siswa, faktor ekonomi keluarga, serta tingginya angka putus sekolah, terutama pada jenjang SMA. Selain itu, sosialisasi dan koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami strategi penerapan kebijakan program wajib belajar di Kabupaten Aceh Singkil serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan wajib belajar telah dilakukan melalui sosialisasi, pemberian bantuan pendidikan, pemerataan akses, kerja sama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Kendala utama yang ditemukan meliputi jarak dan akses menuju sekolah, kondisi jalan dan transportasi, keterbatasan ekonomi keluarga, keinginan siswa untuk bekerja, rendahnya motivasi belajar, serta kurangnya dukungan dari keluarga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat serta tindak lanjut yang lebih konkret terhadap siswa yang berisiko putus sekolah.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Wajib Belajar, Pendidikan, Aceh Singkil.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Program wajib belajar di Indonesia adalah kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap warga negara yang berusia sekolah untuk mengikuti pendidikan minimal hingga tingkat tertentu. Saat ini, kebijakan ini telah berkembang menjadi wajib belajar selama 13 tahun, yang mencakup pendidikan dasar hingga menengah (TK/PAUD, SD, SMP, dan SMA/ sederajat) pada PP Nomor 47 Tahun 2008.¹ Tujuan utamanya adalah untuk menjamin pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Program ini memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.² Dalam pelaksanaannya, program ini didukung oleh berbagai kebijakan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program sekolah gratis. Namun program ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas, kondisi geografis, dan faktor ekonomi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua agar tujuan pendidikan yang merata dan berkualitas dapat tercapai.³

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., “Kebijakan Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020,” 2020.

² Alfian Khadafi, Siti Qomariyah, dan Doa Fajarwati, "Perencanaan Wajib Belajar 12 Tahun," *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika* 2, no. 1 (2025): 91–110, <https://doi.org/10.62383/katalis.v2i1.1204>.

³ Dwi Wulan Sari and Qolbi Khoiri, “Pendidikan Untuk Semua : Studi Pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun” 05, no. 03 (2023): 9441–50.

Perpres Nomor 63 Tahun 2020 menyatakan bahwa Aceh Singkil salah satu yang termasuk sebagai wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Kondisi geografis yang menantang, minimnya infrastruktur, dan terbatasnya akses transportasi menghambat layanan publik, khususnya di bidang pendidikan, untuk berfungsi optimal. Sekolah-sekolah di wilayah ini masih kesulitan dengan fasilitas dasar yang tidak memadai, kekurangan guru yang berkualitas, dan terbatasnya akses terhadap sumber daya pembelajaran modern. Situasi ini mencerminkan permasalahan umum yang dihadapi wilayah 3T, di mana kualitas dan pemerataan pendidikan tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan.⁴

Table 1. Berdasarkan Sumber Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

No	Kabupaten/Kota & Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (P0) menurut Kabupaten/Kota (Persen)			
		2022	2023	2024	2025
1	Simeulue	18,37	17,92	17,69	15,52
2	Aceh Singkil	19,18	19,15	19,06	17,07
3	Aceh Selatan	12,43	12,10	12,02	9,89
4	Aceh Tenggara	12,83	12,45	11,99	9,78
5	Aceh Timur	13,91	13,39	13,26	11,24
6	Aceh Tengah	14,50	14,38	14,27	12,29
7	Aceh Barat	17,93	17,86	17,60	15,50
8	Aceh Besar	13,38	13,38	13,21	11,05
9	Pidie	18,79	18,78	18,59	16,46
10	Bireuen	12,51	12,12	12,10	10,30
11	Aceh Utara	16,86	16,64	16,11	14,27
12	Aceh Barat Daya	15,44	15,43	15,32	13,30
13	Gayo Lues	18,87	18,82	18,30	16,77
14	Aceh Tamiang	12,61	12,51	12,17	10,84
15	Nagan Raya	17,38	17,25	16,94	15,42
16	Aceh jaya	12,51	12,42	12,25	10,37
17	Bener Meriah	18,39	18,31	18,18	16,20
18	Pidie Jaya	18,45	18,40	18,28	16,12

⁴ Kemendikbud, "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024," *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2020, 174.

19	Banda Aceh	7,13	7,04	6,95	5,45
----	------------	------	------	------	------

Anak-anak yang tinggal di daerah 3T sering kali mengalami marginalisasi dalam akses terhadap pendidikan, sehingga hak yang diberikan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas belum sepenuhnya terwujud. Banyak sekolah di wilayah pesisir yang kekurangan fasilitas yang memadai dan tenaga pengajar yang terlatih. Akibatnya, kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak di wilayah ini menjadi rendah.⁵

Table 2. Badan Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2023

Tahun	Tidak Sekolah / Tidak Tamat SD	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	Perguruan Tinggi
2022	17,89	19,33	22,90	27,80	12,08
2023	17,53	18,91	23,47	28,68	11,40

Data menunjukkan tingkat pendidikan tertinggi yang dimiliki penduduk Aceh pada tahun 2022 dan 2023. Data tersebut dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikan: SD tidak tamat, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, dan perguruan tinggi. Secara umum, tingkat pendidikan tertinggi yang dimiliki penduduk Aceh didominasi oleh pendidikan SMP sederajat. Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP sederajat yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Sementara itu, tingkat pendidikan SMA sederajat dan perguruan tinggi memiliki persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan SMP sederajat. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Aceh yang belum menyelesaikan pendidikan menengah atas. Secara keseluruhan, tingkat pendidikan di Aceh mengalami

⁵ Nurul Ihsan, "Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi," *Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun II*, no. 1 (2015): 17–18.

peningkatan dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Terlihat dari persentase penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMA sederajat dan perguruan tinggi mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin meningkat.⁶

Kebijakan pelaksanaan yang menjamin terpenuhinya hak pendidikan untuk anak-anak di daerah pesisir adalah elemen penting dalam upaya mencapai pemerataan pendidikan. Namun kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta akses layanan pendidikan yang belum merata membuat wilayah pesisir sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini, partisipasi berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyediaan hak pendidikan bagi anak-anak. Dengan diidentifikasinya berbagai tantangan dan peluang yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta rekomendasi mengenai solusi atau metode yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak di daerah tersebut.

Penelitian tentang pelaksanaan program wajib belajar di Kabupaten Aceh Singkil menunjukkan kebaruan yang signifikan jika dibandingkan dengan studi-studi

⁶ Luc Vinet and Alexei Zhedanov, "A 'missing' Family of Classical Orthogonal Polynomials," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 1–14, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

⁷ Muhammad Saiful Anwar, "Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan Dalam Perpektif Pendidikan Multikultural," *Foundasia* 13, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>.

sebelumnya, baik dari segi empiris, teoritis, maupun konseptual. Secara empiris, penelitian ini menyoroti daerah pesisir yang termasuk dalam kategori 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), yaitu Kabupaten Aceh Singkil, yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda dari wilayah lain di Aceh maupun Indonesia secara keseluruhan. Di sisi lain, penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan kebijakan publik dalam memenuhi hak pendidikan anak dengan fokus pada dinamika pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

Inovasi dalam penelitian ini terletak pada penerapan model implementasi kebijakan dengan pendekatan bottom-up atau Backward Mapping yang diperkenalkan oleh Richard F. Elmore. Model ini menekankan pentingnya analisis dari tingkat pelaksana langsung (*street-level implementers*) serta kelompok sasaran kebijakan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada masalah akses, tetapi juga menyelidiki bagaimana kebijakan wajib belajar diterjemahkan, disesuaikan, dan dilaksanakan oleh guru, kepala sekolah, serta aparat dinas pendidikan dalam konteks keterbatasan wilayah pesisir 3T. Dengan demikian, penelitian ini menyajikan analisis implementasi kebijakan yang lebih kontekstual dan operasional.

Kebaruan konseptual dari penelitian ini semakin diperkuat melalui integrasi teori implementasi kebijakan dengan perspektif hak pendidikan dan keadilan sosial. Penelitian ini menghubungkan model implementasi kebijakan dengan konsep hak pendidikan yang dikembangkan oleh UNESCO, pendekatan kapabilitas dari Amartya Sen, serta teori keadilan distributif dari John Rawls. Dengan menggabungkan pendekatan implementasi kebijakan dan perspektif hak asasi pendidikan, penelitian ini tidak hanya menilai hasil

atau kualitas pendidikan, tetapi juga mengkaji sejauh mana negara, melalui pemerintah daerah, menjalankan kewajibannya dalam menjamin hak pendidikan anak di wilayah pesisir.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat identifikasi masalah seperti, kesenjangan Akses dan Kualitas Pendidikan di Wilayah 3T (Aceh Singkil) Kondisi geografis Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan daerah pesisir dan termasuk dalam kategori 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) mengakibatkan terbatasnya infrastruktur, akses transportasi, serta memberikan fasilitas sekolah dan tenaga pendidik yang berkualitas jika dibandingkan dengan daerah perkotaan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang diambil sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi implementasi kebijakan program wajib belajar di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana tantangan strategi implementasi kebijakan program wajib belajar di Kabupaten Aceh Singkil?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi implementasi kebijakan program pendidikan wajib belajar di Kabupaten Aceh Singkil.

2. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan strategi implementasi kebijakan program wajib belajar dalam meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dan harapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berpotensi memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai akses pendidikan anak-anak di daerah pesisir, serta berbagai faktor yang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam pendidikan formal.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kondisi lingkungan dan risiko bencana alam terhadap akses pendidikan, sehingga dapat merumuskan strategi mitigasi yang efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya adalah kumpulan keputusan, tindakan, atau pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik tidak hanya mencakup keputusan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan, tetapi juga mencakup keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu ketika pemerintah memilih untuk membiarkan suatu masalah dalam keadaan tertentu. Definisi ini sejalan dengan *Implementation Researching Educational Policy* yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.⁸

Kebijakan publik biasanya dipahami melalui siklus kebijakan (policy cycle). Meskipun dalam praktiknya proses ini tidak selalu berlangsung secara linier, siklus kebijakan dapat membantu kita memahami bagaimana suatu kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan. Secara umum, proses ini mencakup identifikasi masalah atau penetapan agenda, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Setelah evaluasi, kebijakan dapat dilanjutkan, diperbaiki, diubah, atau dihentikan sesuai dengan hasil dan kondisi yang ada. OECD menekankan bahwa proses pembuatan kebijakan dalam kenyataannya tidak selalu mengikuti tahapan yang

⁸ Caroline Dyer, "Implementation Researching Educational Policy : Mapping Approach," *Comparative and General Pharmacology* 35, no. 1 (2011): 45–61.

sepenuhnya linier, tetapi kerangka siklus tetap bermanfaat untuk memahami hubungan antar tahapan kebijakan.⁹

Pada tahap penetapan agenda, pemerintah mengidentifikasi isu-isu yang dianggap penting dan memerlukan perhatian. Selanjutnya, pada tahap pembahasan, pemerintah dan pihak terkait menyusun berbagai alternatif solusi. Tahap pengambilan keputusan menentukan alternatif mana yang akan diterapkan sebagai kebijakan. Setelah itu, kebijakan memasuki tahap implementasi, yaitu kebijakan ke dalam program dan tindakan nyata. Tahap terakhir adalah evaluasi, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuannya serta mengidentifikasi hambatan dan dampak yang muncul. Mengingat kebijakan merupakan proses yang dinamis, hasil evaluasi dapat menjadi landasan untuk memperbaiki kebijakan di masa mendatang.¹⁰

2.1.2. Strategi Kebijakan

Strategi kebijakan dapat diartikan sebagai kumpulan pendekatan, pilihan, dan langkah-langkah yang dirancang secara sistematis oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai, instrumen yang digunakan, sumber daya yang tersedia, serta kondisi lingkungan di mana kebijakan tersebut diterapkan.¹¹ Oleh karena itu, kebijakan strategi tidak hanya berfokus pada apa yang ingin dicapai, tetapi juga pada cara yang efektif untuk

⁹ *Policy Framework on Sound Public Governance, Policy Framework on Sound Public Governance*, 2020, <https://doi.org/10.1787/c03e01b3-en>.

¹⁰ OCDE, *Government at a Glance 2025, Government at a Glance*, vol. 2025, 2025, https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2025_0efd0bcd-en.html.

¹¹ Michael Howlett, *Designing Public Policies Principles and Instruments* (Abingdon: Routledge, 2011), 45.

mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks kebijakan desain, keterkaitan antara tujuan dan instrumen sangatlah penting. Kebijakan yang efektif harus dapat diterapkan pada instrumen yang diterapkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, instrumen kebijakan harus memiliki kapasitas yang mampu untuk mengatasi permasalahan yang menjadi fokus kebijakan.¹²

Strategi kebijakan memiliki peran penting dalam tahap implementasi karena kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah perlu diterapkan dalam bentuk tindakan nyata. Strategi ini diperlukan untuk menentukan bagaimana pemerintah menghadapi berbagai kendala, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, membangun koordinasi dengan pihak terkait, serta menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kondisi yang ada di lapangan. Dalam pelaksanaannya, strategi yang baik tidak hanya bergantung pada satu instrumen kebijakan saja. Menurut Howlett, berbagai instrumen kebijakan dapat dikombinasikan atau digunakan secara bersama-sama agar dapat menangani berbagai permasalahan yang muncul. Selain itu, penggunaan instrumen secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang berkembang juga dapat menjadi bagian dari strategi dalam pelaksanaan kebijakan..¹³

¹² Valeria Tarditi, "Policy Framing and Party Competition: The Italian Political Debate on Local Public Services since the Economic Crisis," *Partecipazione e Conflitto* 13, no. 1 (2020): 633–64, <https://doi.org/10.1285/i20356609v13i1p633>.

¹³ Mukhammad Fahrurrozi et al., "Evaluation of the Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Policy in Improving Tolerance and Harmony among Religious Communities," *Smart Society* 6, no. 1 (2026): 245–55, <https://doi.org/10.58524/smartsociety.v6i1.1035>.

2.1.3. Strategi Implementasi Kebijakan

Strategi implementasi kebijakan merupakan serangkaian cara atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak pelaksana untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan ke dalam tindakan nyata. Strategi ini bertujuan agar tujuan kebijakan yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Dengan demikian, strategi implementasi dapat dipahami sebagai penghubung antara kebijakan yang telah dibuat dengan hasil yang ingin dicapai oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pihak pelaksana tidak hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan, tetapi juga perlu memperhatikan berbagai hal, seperti ketersediaan sumber daya, komunikasi, koordinasi antar pihak, pembagian tugas, serta pengawasan. Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan keadaan lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kejelasan tujuan kebijakan, kemampuan pelaksana, komunikasi yang baik, ketersediaan sumber daya, karakteristik lembaga, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada.¹⁴

Tujuan utama dari implementasi strategi adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat diterapkan dalam bentuk program dan tindakan nyata sehingga tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai. Strategi implementasi diperlukan karena sering terdapat perbedaan antara rencana yang telah dibuat dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sebuah kebijakan yang sudah dirancang

¹⁴ Ahmad Nizar Hilmi and Lili Nur Indah Sari, "Policy Implementability in Public Sector Innovation: Reconstructing Classical Implementation Theory," *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 10, no. 2 (2026): 1–12.

dengan baik belum tentu dapat berjalan dengan maksimal apabila tidak didukung oleh pelaksanaan yang tepat.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan strategi perlu diperhatikan beberapa hal, seperti kegiatan apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, sumber daya yang dibutuhkan, bagaimana koordinasi antar pihak dilakukan, serta bagaimana masyarakat atau kelompok sasaran dilibatkan. Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga perlu diawasi dan dievaluasi untuk mengetahui apakah program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pada dasarnya, implementasi merupakan proses yang terus berjalan dan dapat berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi, karena perubahan pada satu faktor dapat memengaruhi pelaksanaan faktor lainnya.¹⁵

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III pada tahun 1980 adalah salah satu kerangka analisis yang paling berpengaruh dalam studi kebijakan publik. Teori ini memberikan penjelasan yang sistematis mengenai mengapa kebijakan terlihat baik secara kontekstual sering kali mengalami kegagalan saat diterapkan di lapangan. Dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* menyatakan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya sekedar proses administratif yang mekanis, tetapi juga merupakan proses politik dan manajerial yang kompleks, yang melibatkan berbagai aktor, lembaga, dan dinamika organisasi.¹⁶

¹⁵ Asnaini, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47," *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2008* 23, no. 45 (2008): 5–24.

¹⁶ Van Vang Le2 Minh Tuan Pham1*, Anh Tuan Hoang2, Anh Tuan Le1, Abdel Rahman M.Said Al-Tawaha3, Van Huong Dong2, "Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III" 2 (2024): 306–12.

Secara fundamental, Edwards III mengartikan penerapan kebijakan sebagai fase setelah kebijakan ditetapkan, di mana keputusan kebijakan diubah menjadi tindakan nyata oleh birokrasi dan aparat pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ia menekankan bahwa implementasi berfungsi sebagai jembatan antara penyusunan kebijakan dan hasil yang diharapkan, sehingga kualitas implementasi sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan kebijakan. Dalam hal ini, kegagalan dalam implementasi sering kali bukan disebabkan oleh kualitas kebijakan yang buruk, melainkan oleh kelemahan dalam proses pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan empat faktor kunci yang saling berhubungan.

Teori ini bermula dari asumsi bahwa pelaksanaan kebijakan melibatkan rangkaian panjang aktor, mulai dari pembuat kebijakan di tingkat pusat hingga pelaksana di lapangan, serta kelompok sasaran yang menjadi penerima manfaat dari kebijakan tersebut. Dalam rangkaian implementasi ini, informasi, sumber daya, dan instruksi harus mengalir dengan efektif agar kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Namun dalam praktiknya, sering kali terjadi distorsi, keterlambatan, atau bahkan penyimpangan akibat berbagai hambatan organisasi, politik, dan teknis. Oleh karena itu, Edwards III mengembangkan kerangka analisis yang tekanan pada empat variabel utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap) pelaksana, dan struktur birokrasi.

Hal ini juga menekankan bahwa faktor keempat ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain karena interaksi dan pengaruh yang ada di antara mereka. Misalnya, komunikasi yang efektif tidak akan berhasil jika sumber daya yang tersedia

tidak mencukupi, sementara sumber daya yang tidak memadai akan memberikan hasil optimal jika disposisi pelaksana bersifat negatif. Disposisi yang positif pun tidak akan terwujud tanpa dukungan dari struktur birokrasi yang memadai, dan struktur birokrasi yang jelas tidak akan berfungsi dengan baik jika komunikasi tidak berjalan lancar. Oleh karena itu, keberhasilan dalam implementasi kebijakan sangat bergantung pada keseimbangan dan sinergi dari keempat faktor tersebut. Teori ini telah diterapkan dalam berbagai konteks kebijakan, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan lingkungan, berkat kemampuannya dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasi secara sistematis.¹⁷

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, instruksi, dan arahan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana serta kelompok sasaran. Edwards III menegaskan bahwa komunikasi yang efektif adalah syarat utama agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.

Aspek penting dalam komunikasi meliputi kejelasan, konsistensi, dan ketepatan. Kejelasan mengacu pada penyampaian informasi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak menimbulkan berbagai interpretasi. Konsistensi berarti pesan yang disampaikan

¹⁷ Ainun Jariyah et al., "Study On The Implementation Of The Social Rehabilitation Program Policy For Physical Disabilities At East Java Provincial Social Service.," *International Journal of Social Science and Humanity* 2, no. 4 (2025): 39–47, <https://doi.org/10.62951/ijss.v2i4.518>.

harus seragam dari tingkat atas hingga bawah untuk menghindari kebingungan. Ketepatan menunjukkan bahwa informasi harus akurat dan sesuai dengan tujuan kebijakan. Tanpa komunikasi yang efektif, pelaksana kebijakan tidak akan memahami tindakan yang harus diambil, sehingga kebijakan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

b. Sumber Daya

Sumber daya mencakup seluruh sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, termasuk sumber daya manusia, sumber daya finansial, fasilitas dan infrastruktur, waktu, serta informasi dan dukungan teknis. Edwards III menekankan bahwa kebijakan yang baik tidak akan berhasil tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Keterbatasan sumber daya sering kali menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan, terutama di negara berkembang atau daerah dengan kapasitas terbatas.

Sumber daya meliputi jumlah manusia dan kualitas pegawai yang menjalankan kebijakan. Apabila jumlah pelaksana tidak mencukupi atau kompetensinya rendah, maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat. Sumber daya finansial mencakup anggaran yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya program, termasuk biaya operasional, insentif, dan bantuan langsung. Fasilitas dan infrastruktur meliputi sarana fisik, peralatan, teknologi, dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Waktu juga merupakan sumber daya yang penting karena kebijakan pelaksanaan memerlukan waktu yang cukup untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana mengacu pada sikap, komitmen, dan keinginan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Edwards III menekankan bahwa disposisi pelaksana adalah faktor penting karena pelaksana kebijakan merupakan aktor yang berinteraksi langsung dengan kelompok sasaran dan menentukan cara kebijakan diimplementasikan dalam tindakan nyata.

Aspek yang krusial dalam disposisi meliputi komitmen terhadap keberhasilan program, penerimaan terhadap kebijakan, dan motivasi untuk menjalankan tugas dengan baik. Komitmen menunjukkan bahwa pelaksana merasa bertanggung jawab atas keberhasilan program dan bersedia berusaha keras untuk mencapai tujuan. Penerimaan menunjukkan bahwa pelaksana mendukung kebijakan tersebut dan tidak merasa terbebani atau disengaja. Motivasi menunjukkan bahwa pelaksana memiliki dorongan internal untuk melaksanakan tugas dengan baik, bukan sekadar karena kewajiban formal.

d. Struktural Birokrasi

Struktur birokrasi mengacu pada pengelolaan organisasi, distribusi tugas, prosedur operasional, dan mekanisme koordinasi antar unit dalam pelaksanaan kebijakan. Edwards III menegaskan bahwa adanya struktur birokrasi yang baik merupakan syarat penting agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung dengan efisien dan efektif. Struktur birokrasi menentukan cara pembagian tugas, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan koordinasi antar unit.

Aspek penting dalam struktur birokrasi meliputi prosedur kejelasan (SOP), pembagian tugas yang terdefinisi dengan baik, koordinasi yang efisien, serta hierarki dan izin yang mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Kejelasan prosedur mengacu pada adanya prosedur operasional standar yang jelas dan terdokumentasi, sehingga pelaksana memahami apa yang perlu dilakukan. Pembagian tugas yang terdefinisi dengan baik berarti setiap unit dan individu memiliki tanggung jawab dan tugas yang spesifik. Koordinasi yang efisien menunjukkan adanya mekanisme kerja sama antarunit untuk mencegah tumpang tindih atau kekosongan tanggung jawab. Hierarki dan resmi yang jelas menunjukkan bahwa struktur organisasi memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.¹⁸

2.1.4. Program Wajib Belajar

Program wajib belajar adalah kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia yang berada dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan hingga tingkat tertentu sebagai upaya memenuhi hak dasar warga negara dalam bidang pendidikan. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara kepada semua anak Indonesia agar dapat mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa melihat latar belakang ekonomi, sosial, budaya, atau kondisi geografis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ayat (1) Pasal 6, setiap warga negara yang berusia antara tujuh hingga lima belas tahun diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya, pemerintah

¹⁸ Zainal Mustofa, Nurul Aini, and Muhammad Zaironi, "Trayektori Kebijakan Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa 2010 – 2025 : Perspektif Grindle Dan Edward III" 4 (2026): 5884–96.

meluncurkan kebijakan Program Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menjelaskan bahwa program wajib belajar adalah pendidikan minimum yang harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia, yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian, keberhasilan program wajib belajar tidak hanya bergantung pada masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang mudah diakses, berkualitas, dan merata.¹⁹

Dalam ranah administrasi publik, program wajib belajar adalah pelaksanaan kebijakan publik yang direalisasikan melalui berbagai aktivitas pemerintah, seperti penyediaan fasilitas pendidikan, penempatan guru, pemberian bantuan pendidikan, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap anak-anak usia sekolah yang berisiko putus sekolah. Oleh karena itu, program wajib belajar seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kewajiban untuk bersekolah, tetapi juga sebagai serangkaian langkah pemerintah untuk memastikan bahwa hak pendidikan setiap warga negara terpenuhi.²⁰

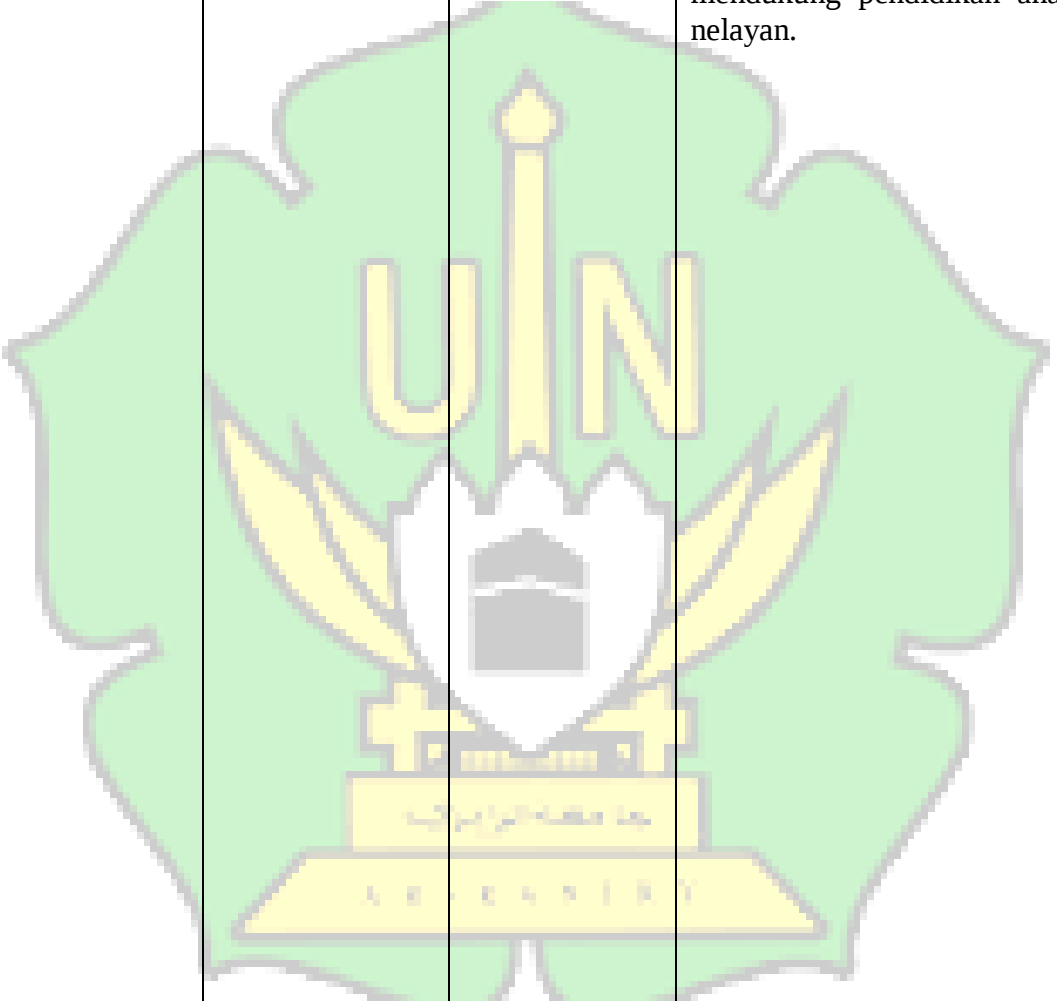
¹⁹ Asnaini, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47."

²⁰ Rencana Strategis, "Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Rencana Strategis 2020-2024," 2024.

2.2. Penelitian Terdahulu

NO	Penulis dan Tahun Terbit	Kerangka Konseptual	Metode Penelitian	Teknis Analisis Data	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
1	Muslem Daud. (2017). ²¹	- Pola Pendidikan dasar - Pendidikan kecakapan hidup	Kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada masyarakat nelayan di Aceh.	Analisis kualitatif	Menunjukkan bahwa pola pendidikan yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan anak nelayan, dan masih terdapat kekurangan dalam program pendidikan khusus untuk mereka di Aceh. Selain itu, tantangan yang dihadapi, seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, menghambat akses pendidikan, dan kurangnya perhatian dari pemerintah serta lembaga terkait terhadap pendidikan anak nelayan. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini menekankan perlunya intervensi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan program pendidikan yang lebih relevan, serta pentingnya	E : Banda Aceh (Kabupaten) VS Aceh Singkil (Kabupaten) T : Maslow VS Richard Elmore P : Kurangnya penelitian lanjutan untuk mengevaluasi keberhasilan program pendidikan yang telah diterapkan, serta keterbatasan data mengenai dampak jangka panjang dari pendidikan yang diberikan kepada anak nelayan. Selain itu, perluasan penelitian untuk melibatkan lebih banyak suara dari masyarakat nelayan

²¹ Muslem Daud, "Peluang Dan Tantangan Pendidikan Wilayah Pesisir Aceh," *Seminar Nasional II USM 2017 1* (2017): 65–72.

					sinergi antara berbagai kementerian untuk mendukung pendidikan anak nelayan.	dalam pengembangan program pendidikan juga menjadi penting, serta penelitian tentang efektivitas model pendidikan non-formal yang diterapkan di komunitas nelayan. VS Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan penyediaan hak pendidikan bagi anak-anak di kawasan-kawasan pesisir. Dengan diidentifikasinya tantangan dan peluang yang ada, diharapkan dapat menemukan solusi atau cara yang lebih optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan
--	--	--	--	---	---	--

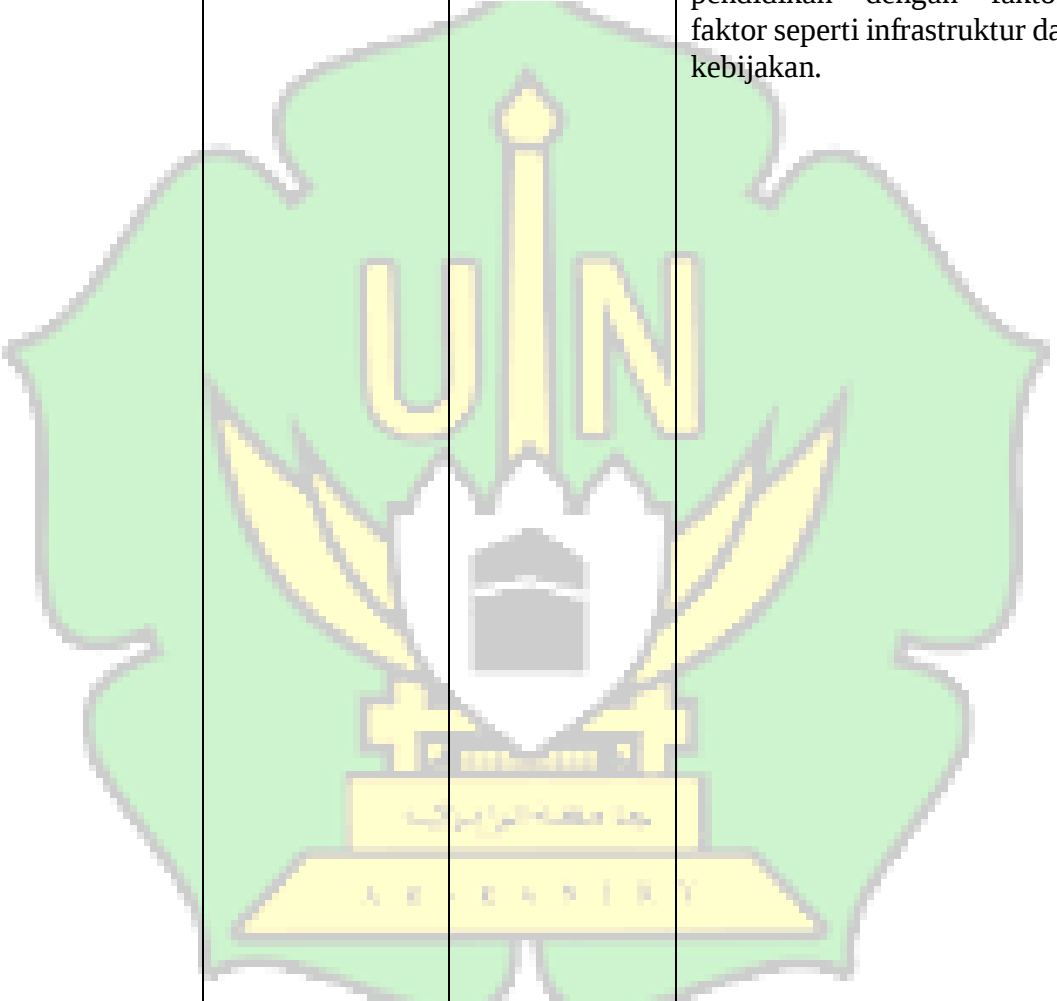
						anak di wilayah tersebut.
2	Budi Wiranto, (2016). ²²	- Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. - Manajemen sekolah - Upaya sekolah dalam meningkatkan partisipasi	Kualitatif, observasi, wawancara, dokumentasi	- Model Analisis - Triangulasi	Menunjukkan bahwa karakteristik partisipasi masyarakat di SDN Jeruk III ditandai dengan penggunaan manajemen terbuka, di mana masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Upaya sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat meliputi pembangunan citra sekolah, penggunaan tokoh masyarakat untuk menarik partisipasi, serta pelaksanaan silaturahmi dan himbuan kepada orang tua. Bentuk partisipasi masyarakat yang teridentifikasi dalam penelitian ini meliputi partisipasi finansial/material, partisipasi ide dan gagasan, serta partisipasi moral dalam bentuk dukungan dan doa.	E : Surakarta (Kabupaten) VS Aceh Singkil (Kabupaten) T : Indrafachrudi VS Richard Elmore P : Penelitian ini terletak pada kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan melibatkan partisipasi masyarakat yang terbuka. Namun, terdapat perbedaan dalam cara melibatkan masyarakat, di mana penelitian ini menekankan pendekatan yang lebih partisipatif dan bottom-up, serta tanggung jawab

²² Budi Wiratno, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 26, no. 1 (2016): Hlm 28-34.

					bersama dalam pendidikan. Keterbatasan penelitian ini mencakup kemungkinan bahwa temuan tidak mencakup semua aspek partisipasi masyarakat di berbagai konteks pendidikan lainnya, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk generalisasi temuan yang lebih luas. Dengan demikian, teori SIASPA memberikan kerangka yang kuat untuk memahami dinamika partisipasi masyarakat dalam konteks pendidikan di SDN Jeruk III. VS Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan
--	--	--	--	--	---

						kebijakan penyediaan hak pendidikan bagi anak-anak di kawasan-kawasan pesisir. Dengan diidentifikasinya tantangan dan peluang yang ada, diharapkan dapat menemukan solusi atau cara yang lebih optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak di wilayah tersebut.
3	Imam Nur Aziz (2019). ²³	- Aksesibilitas Pendidikan - Kesenjangan sosial - Infrastruktur pendidikan	Mixed methods (studi kasus, survey)	- Analisis Kuantitatif - Analisis Kualitatif	Diharapkan dapat memberikan temuan kualitatif yang mencakup tantangan yang dihadapi oleh pendidik dan siswa dalam akses pendidikan, serta persepsi masyarakat tentang kualitas pendidikan dan kebijakan pemerintah. Temuan kuantitatif akan mencakup data statistik mengenai tingkat partisipasi pendidikan di	E : Indonesia (Negara) VS Aceh Singkil T : M. Quraish Shihab & Sirait VS Van Richard Elmore P : Keterbatasan penelitian sebelumnya yang sering kali fokus pada aspek tertentu dari pendidikan tanpa

²³ Imam Nur Aziz, "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Indonesia Imam," *Intitut Keislaman Abdullah Faqih Gresik*, 2019, https://www.researchgate.net/publication/337782884_PEMERATAAN_AKSES_PENDIDIKAN_BAGI_MASYARAKAT_INDONESIA.

				 berbagai daerah dan analisis hubungan antara kualitas pendidikan dengan faktor-faktor seperti infrastruktur dan kebijakan.	mempertimbangkan faktor lain yang saling terkait. Selain itu, masih kurangnya penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini akan berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan studi yang lebih mendalam tentang dampak kebijakan zonasi dan program beasiswa terhadap akses pendidikan, serta melakukan studi longitudinal untuk melihat perubahan dalam pemerataan pendidikan seiring waktu. VS Penelitian ini memiliki
--	--	--	--	---	---

						signifikansi yang tinggi dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan penyediaan hak pendidikan bagi anak-anak di kawasan-kawasan pesisir. Dengan diidentifikasinya tantangan dan peluang yang ada, diharapkan dapat menemukan solusi atau cara yang lebih optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak di wilayah tersebut.
4	Ivana Grace Sofia Radja, Leo Riski Sunjaya, dan Yohan Eka Wahyunda	- Aksesibilitas Pendidikan - Partisipasi sosial	Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif	Analisis kualitatif dan analisis kuantitatif	Kualitas pendidikan di desa Rowotamtu dan Tisnogambar tergolong rendah, yang dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas, minimnya tenaga pengajar, dan rendahnya motivasi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Terdapat perbedaan	E : Rowotamtu dan Tisnogambar (Desa) VS Aceh Singkil (Kecamatan) T : Talcott Parsons VS Richard Elmore P : Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk

	Febriansyah (2023) ²⁴				signifikan dalam kualitas pendidikan antara desa dan kota, di mana masyarakat cenderung lebih memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka karena kondisi sekolah yang tidak memadai dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan.	meningkatkan pendidikan di daerah tersebut, seperti pengadaan lomba antar sekolah dan pendekatan personal oleh guru kepada murid, masih terdapat tantangan besar yang menghambat kemajuan. Salah satu masalah utama adalah minimnya fasilitas pendidikan yang memadai, yang berdampak pada motivasi siswa untuk bersekolah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan juga menjadi faktor penghambat. Penelitian
--	----------------------------------	--	--	--	--	--

²⁴ Ivana Grace Sofia Radja, Leo Sunjaya Sunjaya, and Yohan Eka Wahyunda, "Kualitas Pendidikan Di Daerah Pedesaan, Studi Kasus Desa Rowotamtu Dan Tisnogambar," *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2023): 296–310, <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i4.1876>.

					sebelumnya cenderung fokus pada aspek aksesibilitas pendidikan, namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di desa-desa tersebut mempengaruhi kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi hubungan antara kondisi sosial masyarakat, fasilitas pendidikan, dan kualitas pendidikan di daerah pedesaan, serta memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif untuk perbaikan sistem pendidikan di wilayah tersebut. VS
--	--	--	--	--	---

						Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan penyediaan hak pendidikan bagi anak-anak di kawasan-kawasan pesisir. Dengan diidentifikasinya tantangan dan peluang yang ada, diharapkan dapat menemukan solusi atau cara yang lebih optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak di wilayah tersebut.
5	Kristi Wardani dan Siti Irene Dwiningrum (2021) ²⁵	- Variable utama - Pendidikan Inklusi	Kualitatif, studi khusus	- Analisis Tematik	Keterlibatan orang tua secara aktif dalam pendidikan inklusi berkontribusi positif terhadap motivasi dan prestasi akademik anak berkebutuhan khusus. Orang tua yang	E : Yogyakarta (Kota) VS Aceh Singkil (Kabupaten) T : Hoover-Dempsey & Sandler VS Richard Elmore

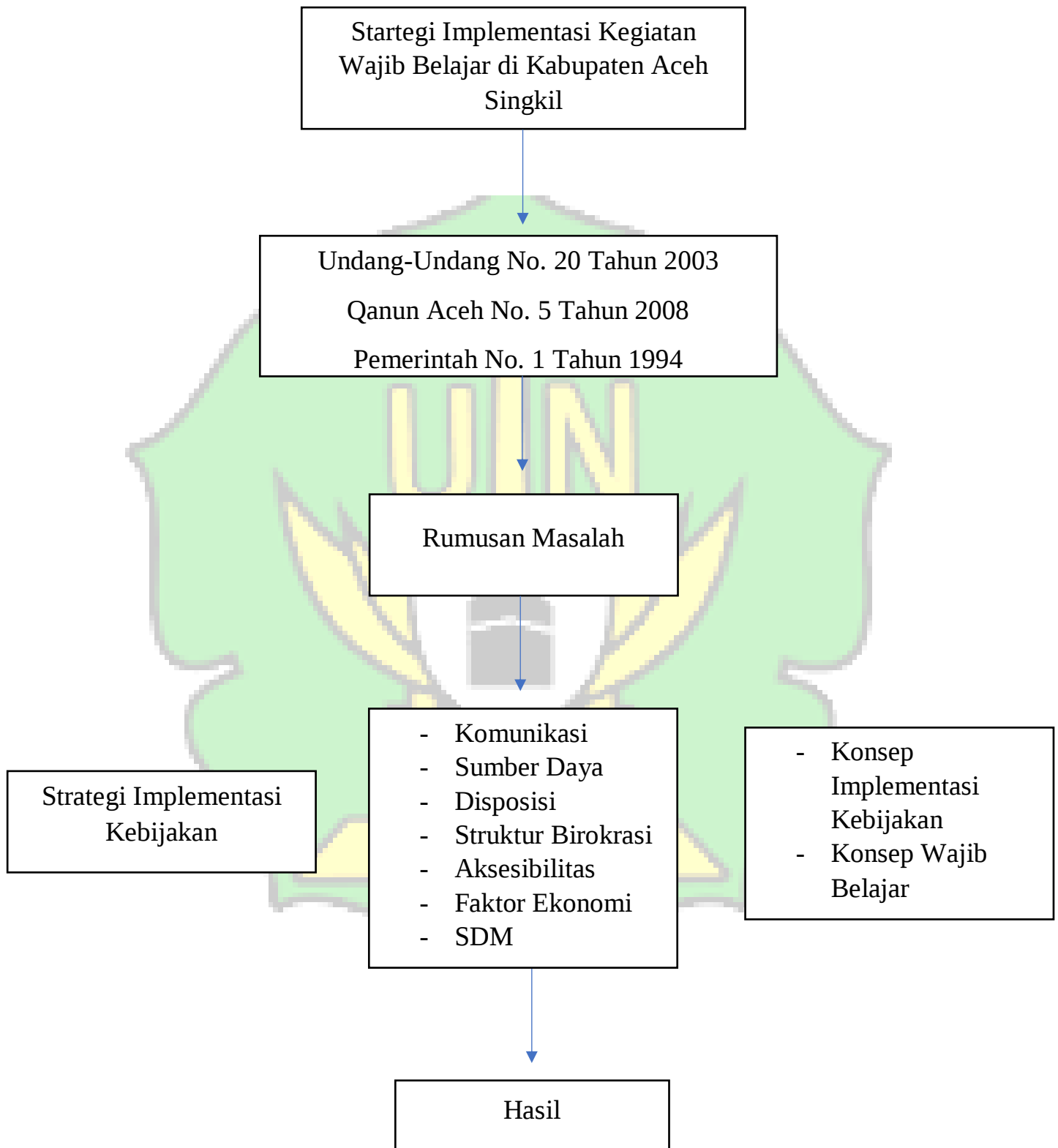
²⁵ Kristi Wardani and Siti Irene Dwiningrum, "Studi Kasus: Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Seruma," *WACANA AKADEMIKA: Majalah Ilmiah Kependidikan* 5, no. 1 (2021): 69, <https://doi.org/10.30738/wa.v5i1.6409>.

				- Triangulasi data	berkomunikasi secara rutin dengan guru dan terlibat dalam kegiatan sekolah menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung. Namun, penelitian juga menemukan adanya tantangan dalam komunikasi antara orang tua dan sekolah, yang dapat menghambat efektivitas pendidikan inklusi.	P : penelitian ini memberikan wawasan penting tentang peran orang tua dalam pendidikan inklusi, terdapat beberapa gap yang perlu diperhatikan. Pertama, masih kurangnya penelitian yang mengeksplorasi peran spesifik orang tua dalam konteks pendidikan inklusi di berbagai latar belakang budaya dan sosial. Kedua, penelitian longitudinal yang dapat memberikan pemahaman tentang dampak jangka panjang dari keterlibatan orang tua terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus masih sangat dibutuhkan. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk
--	--	--	--	---------------------------	---	--

						mengisi kekosongan ini dan memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk praktik pendidikan inklusi. VS Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan penyediaan hak pendidikan bagi anak-anak di kawasan-kawasan pesisir. Dengan diidentifikasinya tantangan dan peluang yang ada, diharapkan dapat menemukan solusi atau cara yang lebih optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak di wilayah tersebut.
--	--	--	--	--	--	---

Berdasarkan hasil review terhadap kelima jurnal terdahulu, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Secara umum, kelima jurnal tersebut memiliki kesamaan karena sama-sama membahas permasalahan pendidikan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, seperti akses pendidikan, kondisi ekonomi, fasilitas, partisipasi masyarakat, dan peran orang tua. Namun, penelitian penulis memiliki kebaharuan dari segi empiris, terutama pada lokasi dan waktu penelitian, yaitu di Kabupaten Aceh Singkil. Dari segi teoritis, penelitian penulis menggunakan teori Hak Pendidikan dan teori Kebijakan Publik, sedangkan kelima penelitian terdahulu menggunakan teori yang berbeda, yaitu jurnal pertama menggunakan teori Hierarki Kebutuhan Manusia, jurnal kedua membahas Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, jurnal ketiga menggunakan teori Manajemen dan Partisipasi Masyarakat, jurnal keempat menggunakan teori Struktural Fungsional, sedangkan jurnal kelima membahas Keterlibatan Orang Tua, Pendidikan Inklusif, dan Kolaborasi. Selain itu, dari segi kebaharuan pengetahuan, penelitian ini lebih berfokus pada implementasi kebijakan dalam pemenuhan hak pendidikan anak, khususnya melalui pelaksanaan kegiatan wajib belajar di Kabupaten Aceh Singkil. Fokus tersebut menjadi pembeda dengan kelima penelitian terdahulu karena penelitian-penelitian tersebut tidak secara khusus membahas implementasi kegiatan wajib belajar pada lokasi penelitian yang sama. Dengan demikian, meskipun memiliki beberapa kesamaan dalam pembahasan mengenai pendidikan, penelitian terdahulu dan penelitian penulis memiliki perbedaan dari segi lokasi, teori yang digunakan, serta fokus penelitian.

2.3. Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, yang dipilih karena tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam pelaksanaan kegiatan wajib belajar di Kabupaten Aceh Singkil, serta berbagai pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan dan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang fenomena implementasi kebijakan melalui interaksi langsung dengan informan dalam situasi yang alami, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dibandingkan hanya mengandalkan data statistik.²⁶

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Tujuan dari pendekatan fenomenologi adalah untuk memahami makna dari pengalaman hidup (pengalaman hidup) yang dialami secara langsung oleh individu terkait fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, fenomena yang dimaksud adalah pelaksanaan kegiatan wajib belajar di Kabupaten Aceh Singkil. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, peneliti berusaha untuk menggali pengalaman para informan, termasuk pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat mengenai bagaimana kebijakan wajib belajar dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan program wajib belajar.²⁷

²⁶ M.D James W. Marshall, *Qualitative Inquiry Dan Research Design*, n.d.

²⁷ Michael Kinter and Nicholas E. Sherman, *Phenomenological Research Methods*, n.d.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Kabupaten ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena karakteristiknya sebagai daerah pesisir yang termasuk dalam kategori 3T, yang menghadapi berbagai tantangan dalam penyampaian pendidikan, seperti keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, dan distribusi tenaga pengajar.

Penelitian ini berfokus pada beberapa unit pendidikan dan lembaga terkait yang berperan dalam pelaksanaan program pendidikan wajib, seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil, sekolah dasar dan menengah, serta masyarakat di daerah pesisir

3.3. Sumber Data

. Informasi dan data penelitian ini berasal dari dua sumber: informan yang diidentifikasi melalui metode identifikasi informan dan dokumen yang berkaitan dengan upaya Dinas Pendidikan untuk memenuhi hak pendidikan di daerah pesisir di Kabupaten Aceh Singkil. Jenis data dan sumbernya meliputi:

3.3.1. Data Primer

Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari sumber pertama, seperti objek atau lokasi penelitian peneliti. Mereka juga dapat disebut sebagai data yang diperoleh dari informan, seperti informasi dan persepsi mereka serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan wawancara sebagai metode pengambilan data lapangan.

3.3.2. Data Sekunder

Sumber data pertama adalah sumber data primer, yang telah diubah menjadi format yang lebih menarik seperti tabel, grafik, dan diagram. Sumber data kedua adalah sumber data sekunder, dan instansi terkait, seperti lembaga pendidikan, akan digunakan untuk mengumpulkan dokumen atau data sekunder.

3.4. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada strategi pelaksanaan kebijakan Program Wajib Belajar di Kabupaten Aceh Singkil serta berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang terdiri dari empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian ini juga membahas berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar, terutama yang berkaitan dengan akses pendidikan, kondisi ekonomi masyarakat, dan ketersediaan sumber daya manusia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan Program Wajib Belajar di Kabupaten Aceh Singkil serta kendala yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan program tersebut.

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan wajib. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling), yang melibatkan pemilihan informan secara sengaja berdasarkan

pertimbangan spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi:

Table 3. Jumlah Informan

No.	Informan Penelitian	Jumlah	Peran/Kontribusi
1.	Dinas Pendidikan (Kepala Sub Kepegawaian)	1	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di daerah, dengan menyesuaikan program wajib belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
2.	Cabang Dinas Pendidikan (Kepala Cabang Dinas Pendidikan)	1	Mengatur pelaksanaan program wajib belajar di tingkat SMA, SMK, dan SLB dalam area kerjanya.
3.	Kepala Sekolah (SMAN 1 SURO Dan SDN 2 SINGKOHOR)	2	Kepala sekolah berperan mengelola pelaksanaan program wajib belajar, mencegah putus sekolah, dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan serta orang tua
4.	Guru (SMAN 1 SINGKOHOR, SMPN 1 SINGKOHOR, SDN 2 SINGKOHOR)	3	Melaksanakan proses pembelajaran agar peserta didik memperoleh pendidikan yang berkualitas.
5.	Orang Tua Siswa	3	Memberikan motivasi dan dukungan belajar
6.	Peserta Didik	2	Mengikuti pembelajaran secara aktif dan menyelesaikan pendidikan hingga tamat untuk mendukung keberhasilan program wajib belajar.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

3.6.1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh wawasan tentang kondisi pendidikan di daerah pesisir Kabupaten Aceh Singkil, termasuk fasilitas pendidikan dan pelaksanaan program pendidikan wajib.

3.6.2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan proses tanya jawab langsung antara peneliti dan informan. Studi ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, yang memanfaatkan serangkaian pertanyaan panduan namun tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk memberikan jawaban yang luas. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi kebijakan pendidikan wajib, peran pelaksana kebijakan, dan berbagai tantangan yang dihadapi selama implementasi kebijakan tersebut.

3.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa;

- a. Data statistik Pendidikan
- b. Dokumen kebijakan Pendidikan
- c. Laporan kegiatan Pendidikan
- d. Foto atau arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan program wajib belajar

3.7. Teknik Analisis Data

3.7.1. Reduksi Data

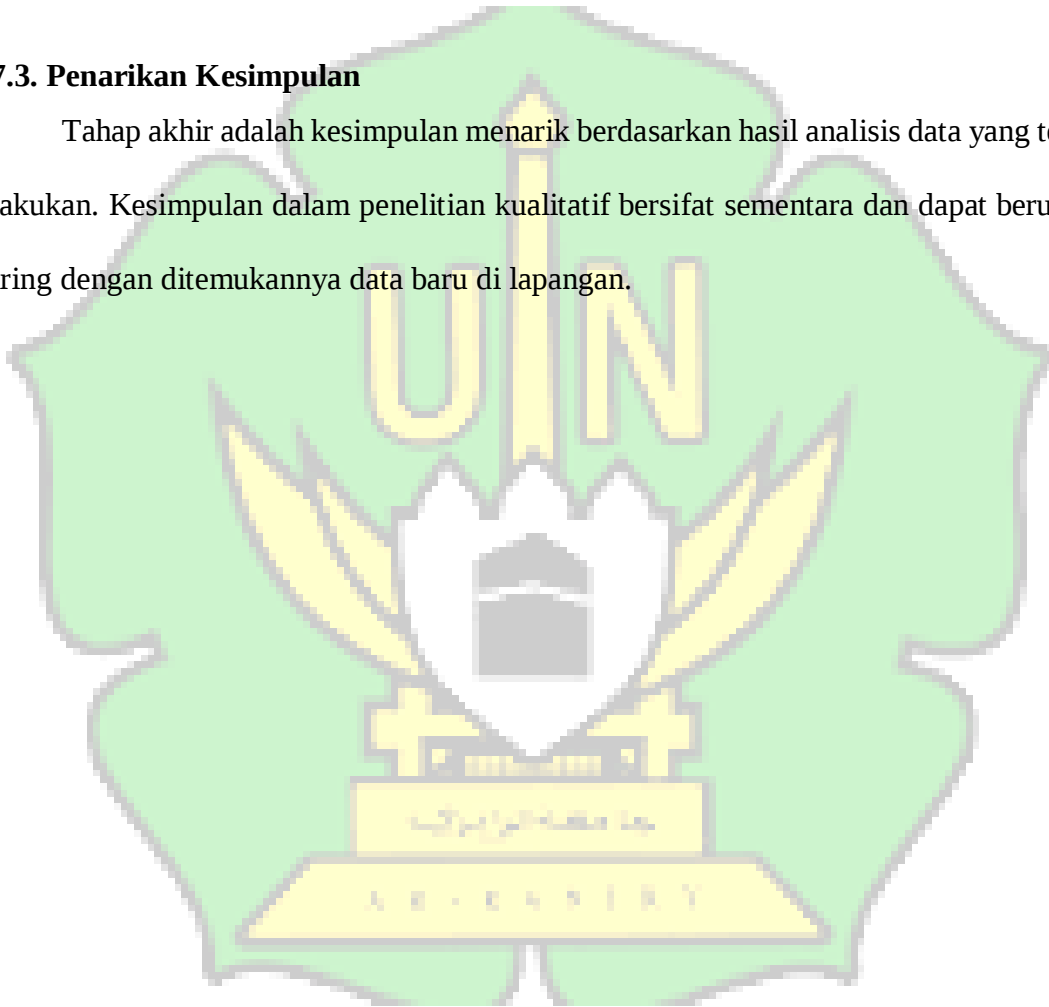
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang dikumpulkan dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian tentang implementasi kebijakan pendidikan wajib.

3.7.2. Penyajian Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Dalam tahap ini, peneliti menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan pendidikan wajib.

3.7.3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah kesimpulan menarik berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan ditemukannya data baru di lapangan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

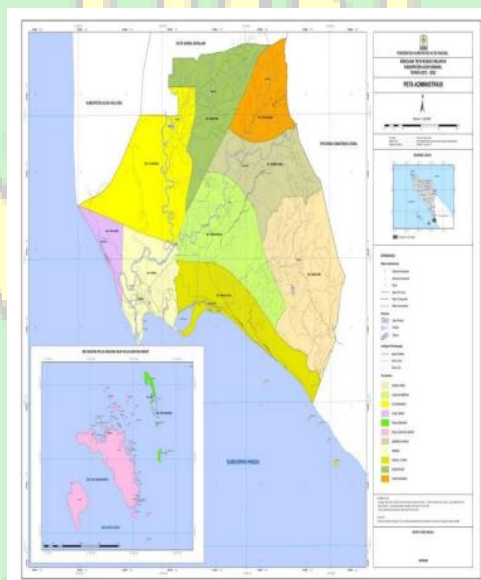
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh, khususnya di bagian selatan provinsi tersebut. Kabupaten ini Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Singkil memiliki luas daratan sekitar 1.857,88 km² yang terbagi menjadi 11 kecamatan, 16 kemukiman, dan 116 kampung. Di samping itu, Aceh Singkil juga memiliki wilayah laut seluas sekitar 2.802,56 km² serta sekitar 87 pulau yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Kondisi geografis ini memberikan Aceh Singkil potensi besar dalam sektor perikanan, pariwisata bahari, dan ekonomi kelautan.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil mencapai 129.333 jiwa, yang terdiri dari 65.272 jiwa laki-laki dan 64.061 jiwa perempuan. Kecamatan Gunung Meriah adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 40.622 jiwa, sedangkan Kecamatan Kuala Baru memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu 2.618 jiwa.

Berdasarkan struktur umur, penduduk Aceh Singkil didominasi oleh kelompok usia muda dan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa daerah ini memiliki potensi sumber daya manusia yang signifikan untuk mendukung pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar penduduk masih tergolong dalam kategori tidak atau belum bersekolah, sementara jumlah lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi relatif lebih sedikit. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses dan mutu pendidikan masih menjadi tantangan dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Secara administratif, Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari 11 kecamatan, 16 kemukiman, dan 116 kampung. Struktur pemerintahan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik serta penyelenggaraan pembangunan di tingkat daerah.



Gambar 1. Peta Kabupaten Aceh Singkil

4.1.1. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil masih menunjukkan tantangan yang cukup besar, terutama dilihat dari tingkat pendidikan penduduknya. Sebagian besar masyarakat masih berada pada kategori tidak atau belum sekolah serta belum menyelesaikan pendidikan dasar. Jumlah penduduk yang tidak atau belum sekolah

mencapai lebih dari 45 ribu jiwa, sementara yang belum tamat sekolah dasar juga masih cukup tinggi sekitar 17,53% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan partisipasi pendidikan di daerah ini masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah seperti SD, SMP, dan SMA memang cukup signifikan, namun belum diimbangi dengan peningkatan pada jenjang pendidikan tinggi. Jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi seperti diploma dan sarjana masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Singkil masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah.²⁸

4.1.2. Peran Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, khususnya dalam mendukung program wajib belajar di Kabupaten Aceh Singkil. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan berfungsi sebagai pelaksana utama kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peran ini meliputi perencanaan program pendidikan, pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan terhadap jalannya kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, Dinas Pendidikan memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pembangunan

²⁸ A Undang-undang Pembentukan Daerah, "Profil Kabupaten Aceh Singkil," no. April (1999): 1–19.

sekolah, penyediaan fasilitas belajar, serta distribusi tenaga pengajar. Selain itu, Dinas Pendidikan juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru, pengembangan kurikulum, serta pemantauan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran di sekolah. Hal ini sejalan dengan fungsi pelaksanaan kebijakan publik yang menekankan pentingnya peran pelaksana dalam mencapai tujuan kebijakan.

Dinas Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terutama dalam mendukung program wajib belajar. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan, pemberian bantuan pendidikan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak seperti sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dalam konteks daerah seperti Aceh Singkil yang menghadapi tantangan geografis dan sosial, peran ini menjadi sangat krusial untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan tingkat partisipasi sekolah.

Selain itu, Dinas Pendidikan berperan sebagai koordinator antara lembaga dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah, sekolah, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa program pendidikan berjalan dengan efektif dan terintegrasi. Peran koordinasi ini sejalan dengan konsep implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya sinergi antara aktor dalam mencapai keberhasilan kebijakan.

4.1.3. Peran Cabang Dinas Pendidikan

Dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar, Cabang Dinas Pendidikan berfungsi sebagai koordinator, pembina, pengawas, dan evaluator untuk penyelenggaraan pendidikan di SMA, SMK, dan SLB. Fungsi ini diwujudkan melalui sosialisasi program

wajib belajar kepada sekolah dan masyarakat, pelatihan kepada kepala sekolah dan guru, koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, serta instansi terkait, pemberian dan pengawasan bantuan pendidikan bagi peserta didik yang memerlukan, pemantauan angka partisipasi sekolah dan angka putus sekolah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Strategi Implementasi Program Wajib Belajar

Rumusan masalah "Bagaimana strategi pelaksanaan program wajib belajar di Kabupaten Aceh Singkil?" bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, khususnya Dinas Pendidikan, dalam melaksanakan Program Wajib Belajar agar dapat berjalan dengan efektif, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan geografis, infrastruktur, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.



Gambar 2. Kegiatan Belajar SDN 2 Singkohor



Gambar 3 Kegiatan Belajar SMPN 1 Singkohor

Penelitian ini tidak hanya menilai pelaksanaan program wajib belajar, tetapi juga menganalisis strategi pelaksanaannya agar tujuan kebijakan pendidikan dapat tercapai. Strategi ini meliputi berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan, menjaga agar peserta didik tetap bersekolah, serta menurunkan angka putus sekolah.

4.2.1.1. Komunikasi

Dalam konteks pendidikan, Dinas Pendidikan perlu menyampaikan mengenai program wajib belajar, syarat penerima bantuan, dan mekanisme pelaksanaan kepada sekolah, orang tua, dan informasi masyarakat dengan cara yang jelas dan konsisten. Apabila informasi yang disampaikan tidak jelas atau tidak konsisten, sekolah dan masyarakat mungkin tidak akan memahami program dengan baik, yang dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi.

“Kami melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk dan baliho di beberapa titik. Tujuannya agar masyarakat bisa melihat dan memahami pentingnya Program Wajib Belajar sehingga minat belajar anak semakin meningkat”.²⁹

²⁹ Wawancara dengan bapak Mujiburrahman sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil 31-03-2026

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan telah berusaha menyampaikan informasi tentang Program Wajib Belajar kepada masyarakat melalui media spanduk dan baliho. Strategi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyebarkan informasi secara luas kepada masyarakat. Penggunaan media visual dipilih karena dianggap efektif dalam menjangkau masyarakat di berbagai lokasi yang sering dilalui. Namun efektivitas sosialisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan media informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam memahami isi informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, keberhasilan sosialisasi harus diukur berdasarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan Program Wajib Belajar, bukan hanya dari jumlah media yang dipasang.

“Menurut saya, pemasangan baliho kurang efektif. Masih ada orang tua yang belum bisa membaca, dan banyak juga yang mengira spanduk atau baliho tersebut hanya iklan biasa sehingga tidak memperhatikan isi tentang pendidikan”.³⁰

Pernyataan dari orang tua peserta didik menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang menggunakan spanduk dan baliho belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Program Wajib Belajar. Masih ada sebagian masyarakat yang kurang memperhatikan informasi tersebut disebabkan oleh terbatasnya kemampuan membaca atau rendahnya minat terhadap media informasi yang digunakan. Perbedaan pandangan antara Dinas Pendidikan dan masyarakat mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan sosialisasi. Dari sudut pandang pemerintah, sosialisasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, sementara dari sudut pandang masyarakat, metode tersebut belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran. Oleh karena itu,

³⁰ Wawancara dengan bapak Agus Sutiawan selaku orang tua peserta didik 03-04-2026

diperlukan pendekatan sosialisasi yang lebih interaktif, seperti penyuluhan langsung melalui sekolah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, atau pertemuan dengan wali murid agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan lebih baik.



Gambar 4 Rapat Pertemuan Orang Tua Siswa SMPN 1 Singkohor



Gambar 5 Rapat Pertemuan Orang Tua Siswa SMAN 1 Suro

“Kami menjalin kerja sama dengan sekolah melalui pertemuan orang tua yang biasanya berlangsung saat pembagian rapor. Pada kesempatan itu, sekolah menekankan pentingnya pendidikan dan mengajak orang tua untuk lebih berperan dalam mendukung proses belajar anak”.³¹

³¹ Wawancara dengan bapak Hery Syahputra sebagai Kepala Sub Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil 27-03-2026

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan sekolah telah dilakukan melalui kegiatan yang melibatkan orang tua siswa. Kegiatan ini berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya pendidikan serta memperkuat komunikasi antara sekolah dan orang tua. Kerja sama ini menegaskan bahwa keberhasilan Program Wajib Belajar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dari sekolah dan keluarga. Semakin baik koordinasi yang terjalin, semakin besar peluang keberhasilan program dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah.



Gambar 6 Rapat Evaluasi Tim Dinas Pendidikan Dengan Kepala Sekolah

“Setiap akhir tahun ajaran, kami mengadakan rapat evaluasi dengan kepala sekolah. Dalam rapat ini, kami membahas tingkat partisipasi sekolah, angka putus sekolah yang masih tertinggi di jenjang SMA, serta berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan Program Wajib Belajar”³²

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Dinas Pendidikan telah melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin melalui pertemuan dengan kepala

³² Wawancara dengan ibu Kerlina Kartika sebagai guru di SMAN 1 Singkohor 04-04-2026

sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami perkembangan pelaksanaan Program Wajib Belajar serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama satu tahun ajaran. Monitoring dan evaluasi merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan kebijakan karena memberikan informasi tentang pencapaian program dan menjadi dasar untuk merumuskan langkah perbaikan di periode mendatang. Oleh karena itu, hasil monitoring seharusnya tidak hanya menjadi bahan diskusi dalam rapat evaluasi, tetapi juga diikuti dengan kebijakan lanjutan yang dapat mengatasi faktor-faktor penyebab putus sekolah, sehingga tujuan Program Wajib Belajar dapat tercapai dengan lebih optimal.

4.2.1.2. Sumber Daya

Dalam program wajib belajar, misalnya diperlukan jumlah guru yang mampu, anggaran BOS yang tepat waktu, fasilitas sekolah yang memadai, dan sistem pendataan siswa yang akurat. Apabila salah satu dari sumber daya ini tidak mencukupi, maka program tersebut tidak akan berjalan dengan optimal.

”Peserta didik mendapatkan bantuan berupa uang saku untuk melanjutkan kegiatan wajib belajar mereka”.³³

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan pendidikan berupa uang saku untuk mengurangi kendala ekonomi yang dihadapi oleh peserta didik. Bantuan ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan. Namun keberhasilan bantuan pendidikan tidak hanya diukur dari penyaluran bantuan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan peserta pendidikan didik.

³³ Wawancara dengan bapak Hery Syahputra sebagai Kepala Sub Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil 27-03-2026

“Anak saya memang menerima bantuan uang saku. Namun, saya merasa jumlah tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk bersekolah”.³⁴

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa bantuan pendidikan telah memberikan keuntungan bagi masyarakat, namun jumlah bantuan yang ada masih belum cukup untuk menutupi seluruh biaya pendidikan. Biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan belajar lainnya masih menjadi beban bagi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan pendidikan berperan sebagai dukungan, tetapi belum sepenuhnya menjadi solusi untuk masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Table 4. Jumlah Guru Aceh Singkil

No.	Tingkat Sekolah	Jumlah Guru
1.	TK Negeri	129
2.	TK Swasta	288
3.	SD Negeri	1.221
4.	SD Swasta	77
5.	SMP Negeri	463
6.	SMP Swasta	209
7.	SMA Negeri	277
8.	SMA Swasta	44

Sumber 1 Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Table 5. Jumlah Siswa Aceh Singkil

No.	Tingkat Sekolah	Jumlah Siswa
1.	TK Negeri	1.333
2.	TK Swasta	2.966
3.	SD Negeri	15.608
4.	SD Swasta	1.474
5.	SMP Negeri	4.854
6.	SMP Swasta	2.583
7.	SMA Negeri	3.525
8.	SMA Swasta	505

Sumber 2 Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

³⁴ Wawancara dengan ibu Musdah selaku orang tua peserta didik 27-03-2026

Berdasarkan data mengenai jumlah guru dan siswa di Kabupaten Aceh Singkil, total guru mencapai 2.291 orang, sedangkan jumlah siswa adalah 28.549 orang. Jika dilihat secara keseluruhan, data ini tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa Kabupaten Aceh Singkil kekurangan guru, karena penentuan kebutuhan guru tidak hanya bergantung pada rasio jumlah siswa terhadap jumlah guru, tetapi juga harus mempertimbangkan beban kerja, kebutuhan pembelajaran, mata pelajaran, serta distribusi guru di setiap satuan pendidikan. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional yang memiliki beban kerja yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan, sedangkan UU Nomor 20 Tahun 2003 menempatkan tenaga kependidikan sebagai bagian dari standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, data ini lebih tepat digunakan sebagai gambaran awal mengenai ketersediaan tenaga pendidik, sedangkan isu yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan wajib belajar adalah pemerataan dan distribusi guru di setiap jenjang dan wilayah sekolah.

“Meski dikatakan sudah cukup, kenyataannya belum. Kami masih menghadapi keterbatasan anggaran, fasilitas pendidikan, tenaga pengajar, dan akses transportasi, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Namun, kami terus berupaya memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin”.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan program yang melibatkan Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, serta orang tua peserta didik. Namun ketersediaan dan pemerataan tenaga pengajar masih menjadi kendala,

³⁵ Wawancara dengan ibu Berlian Munthe selaku kepala sekolah SMAN 1 Suro 04-04-2026

terutama di daerah yang jauh dari pusat kota dan memiliki akses yang sulit. Kondisi ini menyebabkan pelayanan pendidikan belum sepenuhnya merata, karena kebutuhan tenaga pendidik di setiap wilayah tidak selalu dapat terpenuhi secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar di Kabupaten Aceh Singkil sudah tersedia dan memiliki komitmen dalam menjalankan program, namun dari segi jumlah dan pemerataannya masih menghadapi keterbatasan yang menjadi salah satu hambatan dalam mencapai pelaksanaan wajib belajar secara optimal.

4.2.1.3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Pelaksana yang memiliki sikap positif cenderung lebih kreatif dan adaptif dalam menghadapi tantangan di lapangan, sementara disposisi negatif dapat mengakibatkan kebijakan hanya dilaksanakan secara formal atau bahkan diabaikan. Dalam konteks pendidikan, misalnya, guru, kepala sekolah, dan staf Dinas Pendidikan yang memiliki komitmen tinggi terhadap wajib belajar akan lebih proaktif dalam melakukan pendampingan, sosialisasi, dan pemantauan terhadap siswa yang berisiko putus sekolah.

“Saya memilih untuk melakukan pekerjaan serabutan karena dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terkadang memberikan uang kepada orang tua. Selain itu, biaya sekolah masih terasa cukup besar, dan jarak ke sekolah juga jauh sehingga menyulitkan”.³⁶

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa faktor ekonomi tetap menjadi alasan utama bagi peserta didik untuk memilih bekerja ketimbang melanjutkan pendidikan. Selain masalah biaya yang terbatas, jarak ke sekolah juga menjadi kendala yang

³⁶ Wawancara dengan Wahyu Nurohim sebagai siswa yang berhenti sekolah 07-04-2026

memengaruhi kelangsungan pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa hanya memberikan bantuan pendidikan tidaklah cukup untuk mengurangi angka putus sekolah jika tidak diimbangi dengan peningkatan akses pendidikan dan dukungan ekonomi dari keluarga.

“Menurut saya, angka putus sekolah di tingkat SMA masih cukup tinggi. Penyebab yang sering ditemui adalah pernikahan dini, baik karena pergaulan maupun dorongan keluarga. Selain itu, banyak siswa memilih bekerja untuk mencari penghasilan, serta kurangnya motivasi dari lingkungan sekitar, terutama dari orang tua”.³⁷

Bukti data bahwa angka putus sekolah tingkat SMA, SMP, dan SD masih tinggi sesuai dengan pernyataan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 5. Angka putus Sekolah SMA N 1 Suro

NO	Tahun	L	P	Jumlah
1	2023	8	5	13
2	2024	4	1	5
3	2025	6	3	9
4	2026	2	0	2
			Total	29

Table 6. Angka Putus Sekolah SMA N 1 Singkohor

NO	Tahun	L	P	Jumlah
1	2023	11	3	14
2	2024	5	4	9
3	2025	3	2	5
4	2026	2	1	3
			Total	31

³⁷ Wawancara dengan bapak Mujiburrahman sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil 31-03-2026

Table 7. Angka Putus Sekolah SMP N 1 Singkohor

NO	Tahun	L	P	Jumlah
1	2023	3	0	3
2	2024	0	0	0
3	2025	1	0	1
4	2026	0	0	0
			Total	4

Table 8. Angka Putus Sekolah SD N 2 Singkohor

NO	Tahun	L	P	Jumlah
1	2023	0	0	0
2	2024	0	0	0
3	2025	1	0	1
4	2026	0	0	0
			Total	1

Berdasarkan data mengenai angka putus sekolah untuk tahun 2023–2026, masalah putus sekolah masih terlihat di beberapa satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil, dengan angka yang lebih signifikan pada jenjang SMA. SMA Negeri 1 Suro mencatat 29 siswa yang putus sekolah, sedangkan SMA Negeri 1 Singkohor mencatat 31 siswa selama periode tersebut. Di sisi lain, SMP Negeri 1 Singkohor mencatat 4 siswa dan SD Negeri 2 Singkohor mencatat 1 siswa. Data ini menunjukkan bahwa keinginan pendidikan, terutama di jenjang SMA, masih menjadi tantangan. Namun, jumlah siswa yang putus sekolah di kedua SMA tersebut menunjukkan tren penurunan dari tahun 2023 hingga 2026. Oleh karena itu, data ini lebih dipahami sebagai indikasi bahwa putus sekolah masih merupakan masalah yang perlu diatasi dan kondisi ini sangat relevan

dengan amanat Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan serta UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur penyelenggaraan wajib belajar.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa angka putus sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti kondisi ekonomi keluarga, pernikahan dini, rendahnya motivasi belajar, dan kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan anak. Data angka putus sekolah juga mendukung temuan ini, yang menunjukkan bahwa jumlah siswa yang berhenti sekolah masih cukup tinggi di tingkat SMA. Oleh karena itu, pemerintah perlu tidak hanya meningkatkan bantuan pendidikan, tetapi juga memberikan pembinaan kepada keluarga serta memperkuat pendampingan bagi peserta didik yang berisiko putus sekolah.

4.2.1.4. Struktur Birokrasi

Dalam bidang pendidikan, Dinas Pendidikan perlu memiliki SOP yang rinci mengenai pendataan siswa, penyaluran bantuan, serta pemantauan dan evaluasi, di samping mencapai koordinasi yang efektif dengan sekolah dan dinas terkait lainnya. Bilamana birokrasi tidak terdefinisi dengan baik, maka siapa pelaksanaan kebijakan akan terhambat akibat kurangnya kejelasan mengenai yang bertanggung jawab dan bagaimana tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan.



Gambar 7. Kondisi Area Sekolah

4.2.2. Tantangan dan Hambatan Implementasi Program Wajib Belajar

Pelaksanaan Program Wajib Belajar di Kabupaten Aceh Singkil telah dilaksanakan dengan berbagai strategi, termasuk sosialisasi, pemberian bantuan masyarakat pendidikan, pemerataan akses pendidikan, kolaborasi antara pemerintah dan sekolah, serta monitoring dan evaluasi. Namun berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelaksanaan program ini belum sepenuhnya optimal. Terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang mempengaruhi tercapainya tujuan program, terutama dalam meningkatkan partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah. Hambatan-hambatan tersebut terkait dengan komunikasi, keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, ekonomi keluarga, sikap masyarakat, serta koordinasi antarinstansi.

4.2.2.1. Aksesibilitas: Jarak, Kondisi Jalan, dan Transportasi

Hambatan pertama terkait dengan aksesibilitas siswa menuju sekolah. Kabupaten Aceh Singkil memiliki karakteristik wilayah pesisir, pedalaman, dan daerah yang sulit dijangkau. Kondisi geografis ini mengakibatkan sebagian siswa harus menempuh jarak yang cukup jauh dari rumah ke sekolah.



Gambar 8. Kondisi Jalan Singkohor

“Salah satu kendalanya itu akses ke sekolah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. Soalnya sekolah belum tersebar merata, jadi ada anak-anak yang harus menempuh perjalanan cukup jauh. Ditambah lagi, masih ada jalan yang berbatu. Kalau musim hujan, jalannya jadi licin dan berlumpur, sehingga anak-anak lebih sulit pergi ke sekolah dan seragam mereka sering kotor”.³⁸

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat jalan yang berbatu, licin, dan berlumpur, terutama pada musim hujan. Keadaan jalan ini menyulitkan siswa untuk berangkat dan pulang dari sekolah. Beberapa siswa bahkan terpaksa melewati jalan yang rusak, yang menyebabkan seragam mereka sering kotor dan perjalanan menjadi lebih lama.

Selain keadaan jalan, kurangnya sarana transportasi juga menjadi kendala. Tidak semua siswa memiliki akses ke kendaraan yang layak untuk pergi ke sekolah. Bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, tidak adanya transportasi umum atau jarak yang

³⁸ Wawancara dengan ibu Ana Rohana sebagai guru di SMPN 1 Singkohor 27-03-2026

terlalu jauh dari rute transportasi memaksa mereka untuk berjalan kaki atau bergantung pada bantuan orang tua.

Jarak yang jauh dari sekolah dan infrastruktur yang belum memadai tidak hanya berdampak pada kehadiran siswa, tetapi juga meningkatkan biaya serta waktu perjalanan. Dalam situasi tertentu, siswa akhirnya memilih untuk tidak pergi ke sekolah atau bahkan berhenti sekolah karena kesulitan dalam akses. Oleh karena itu, hambatan aksesibilitas menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah, terutama di tingkat SMA.

4.2.2.2. Faktor Ekonomi: Tingkat Kemiskinan Tergolong Tinggi

Hambatan kedua adalah faktor ekonomi keluarga. Banyak orang di Kabupaten Aceh Singkil yang bekerja sebagai nelayan, petani, buruh, atau pekerja informal dengan pendapatan yang tidak selalu stabil. Kondisi ini mengakibatkan kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak menjadi terbatas.

Table 4. Table 5. Angka Kemiskinan Pertahun

No.	Tahun	Persentase
1.	2022	19,18
2.	2023	19,15
3.	2024	19,06
4.	2025	17,07

Sumber 3 Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

“Saya memilih untuk melakukan pekerjaan serabutan karena dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terkadang memberikan uang kepada orang tua. Selain itu, biaya sekolah masih terasa cukup besar, dan jarak ke sekolah juga jauh sehingga menyulitkan”.³⁹

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa beberapa peserta didik memilih untuk bekerja serabutan guna membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan penghasilan bagi orang tua. Pilihan ini mencerminkan bahwa pendidikan masih dihadapkan pada tuntutan ekonomi keluarga. Meskipun sekolah telah memberikan bantuan dan pemerintah telah menyediakan dukungan pendidikan melalui BOS, program pendidikan tanpa biaya, serta bantuan uang saku, biaya tersebut belum sepenuhnya mencukupi.

Peserta didik masih membutuhkan dana untuk transportasi, seragam, buku, perlengkapan belajar, dan kebutuhan sekolah lainnya. Bagi keluarga yang tinggal jauh dari sekolah, biaya transportasi menjadi beban tambahan yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat bantuan pendidikan yang diberikan berfungsi sebagai dukungan, namun belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Faktor ekonomi juga ikut berperan dalam kemampuan orang tua untuk menyediakan waktu dan perhatian dalam mendukung pendidikan anak. Dalam keluarga yang mengalami tekanan ekonomi, anak sering kali didorong untuk membantu dalam pekerjaan. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kehadiran anak di sekolah dan meningkatkan risiko putus sekolah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, faktor

³⁹ Wawancara dengan Wahyu Nurohim sebagai siswa yang berhenti sekolah 07-04-2026

ekonomi masih menjadi alasan utama bagi siswa untuk memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan.

4.2.2.3. Sumber Daya Manusia: Keterbatasan dan Pemerataan Guru

Hambatan ketiga berhubungan dengan sumber daya manusia, terutama dalam hal jumlah dan distribusi guru. Menurut data penelitian, Kabupaten Aceh Singkil sudah memiliki guru di tingkat SD, SMP, dan SMA. Namun, jumlah guru tersebut belum sepenuhnya terdistribusi secara merata di seluruh daerah.

“ kami terpaksa meminta guru dengan basic di pelajaran kimia untuk mengajar di bidang lain seperti mata pelajaran biologi dan ya ada juga beberapa guru yang bukan di bidang kesenian tetapi kami meminta persetujuan beliau apakah dia bisa mengajar di mata pelajaran tersebut”.⁴⁰

Sekolah-sekolah yang terletak jauh dari pusat kota dan berada di daerah terpencil masih mengalami kekurangan tenaga pengajar. Ketidakmerataan ini dapat berdampak pada kualitas layanan pendidikan, karena kebutuhan guru di setiap sekolah tidak selalu terpenuhi dengan baik. Beberapa sekolah mengalami kekurangan guru untuk mata pelajaran tertentu, sehingga proses pembelajaran tidak dapat berlangsung secara maksimal.

Selain jumlah guru, kualitas serta kompetensi tenaga pendidik juga menjadi fokus perhatian. Guru yang bertugas di daerah terpencil sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, beban kerja yang tinggi, dan kondisi peserta didik yang bervariasi. Beban kerja ini menjadi semakin berat jika tidak didukung oleh sumber daya dan koordinasi yang memadai.

⁴⁰ Wawancara dengan ibu Berlian Munthe selaku kepala sekolah SMAN 1 Suro 04-04-2026

Keterbatasan sumber daya manusia juga terlihat dari masih adanya kebutuhan akan tenaga kependidikan tambahan, seperti staf administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga pendukung lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya manusia sudah ada, dari segi jumlah, pemerataan, dan kecukupannya masih mengalami keterbatasan yang menjadi salah satu hambatan dalam mencapai pelaksanaan wajib belajar secara optimal.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program wajib belajar di Kabupaten Aceh Singkil telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Pelaksananya dilakukan melalui sosialisasi, pemberian bantuan pendidikan, pemerataan akses, kolaborasi antara pemerintah dengan sekolah dan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi.

2. Tantangan utama dalam pelaksanaan program ini meliputi kondisi ekonomi keluarga, aksesibilitas dan transportasi, keterbatasan infrastruktur, serta masih adanya siswa yang terpaksa putus sekolah, khususnya di tingkat SMA. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program wajib belajar.

5.2. Saran

1. Dinas Pendidikan harus meningkatkan sosialisasi langsung kepada masyarakat, memperkuat dukungan dan akses pendidikan di daerah terpencil, serta memperbaiki pemantauan terhadap siswa yang berisiko putus sekolah. Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu diperkuat agar pelaksanaan program wajib belajar dapat lebih efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat Aceh Singkil.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, melalui Dinas Pendidikan, harus meningkatkan upaya dalam menangani siswa yang berisiko putus sekolah, khususnya di tingkat SMA. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat bantuan pendidikan,

melakukan pemantauan secara berkala, serta memberikan tindak lanjut langsung kepada siswa dan keluarganya yang menghadapi masalah ekonomi, akses transportasi, dan kurangnya dukungan dari keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Jariyah, Ulul Albab, Priyanto Priyanto, and Abeda Muhammad Iqbal. "Study On The Implementation Of The Social Rehabilitation Program Policy For Physical Disabilities At East Java Provincial Social Service." *International Journal of Social Science and Humanity* 2, no. 4 (2025): 39–47.
<https://doi.org/10.62951/ijss.v2i4.518>.
- Ansell, Chris, and Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543–71.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Anwar, Muhammad Saiful. "Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan Dalam Perpsektif Pendidikan Multikultural." *Foundasia* 13, no. 1 (2022): 1–15.
<https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>.
- Asnaini. "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47." *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2008* 23, no. 45 (2008): 5–24.
- Aziz, Imam Nur. "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Indonesia Imam." *Intitut Keislaman Abdullah Faqih Gresik*, 2019.
https://www.researchgate.net/publication/337782884_PEMERATAAN_AKSES_PENDIDIKAN_BAGI_MASYARAKAT_INDONESIA.
- Bila, Aziza, and Boni Saputra. "Strategi Collaborative Governance Dalam Pemerintahan 1 Collaborative Governance Strategy in Government Sector." *Jurnal Transformasi Administrasi*, 2019, 196–210.

Daerah, A Undang-undang Pembentukan. “Profil Kabupaten Aceh Singkil,” no. April (1999): 1–19.

Daud, Muslem. “Peluang Dan Tantangan Pendidikan Wilayah Pesisir Aceh.” *Seminar Nasional II USM 2017* 1 (2017): 65–72.

Dyer, Caroline. “Implementation Researching Educational Policy : Mapping Approach.” *Comparative and General Pharmacology* 35, no. 1 (2011): 45–61.

Fahrurozi, Mukhammad, Fernandes Simangunsong, Muhadam Labolo, and Layla Kurniawati. “Evaluation of the Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Policy in Improving Tolerance and Harmony among Religious Communities.” *Smart Society* 6, no. 1 (2026): 245–55.
<https://doi.org/10.58524/smartsociety.v6i1.1035>.

Hilmi, Ahmad Nizar, and Lili Nur Indah Sari. “Policy Implementability in Public Sector Innovation: Reconstructing Classical Implementation Theory.” *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 10, no. 2 (2026): 1–12.

Howlett, Michael. *Designing Public Policies Principles and Instruments*, n.d.

Ihsan, Nurul. “Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi.” *Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun II*, no. 1 (2015): 17–18.

James W. Marshall, M.D. *Qualitative Inquiry Dan Research Design*, n.d.

Kemendikbud. “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan

Kebudayaan Tahun 2020-2024.” *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2020, 174.

Kinter, Michael, and Nicholas E. Sherman. *Phenomenological Research Methods*, n.d.

Minh Tuan Pham^{1*}, Anh Tuan Hoang², Anh Tuan Le¹, Abdel Rahman M.Said Al-Tawaha³, Van Huong Dong², Van Vang Le². “Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III” 2 (2024): 306–12.

Minuchin. “Undang-Undang No.20” 4, no. 1 (2003): 147–73.

Mustofa, Zainal, Nurul Aini, and Muhammad Zaironi. “Trayektori Kebijakan Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa 2010 – 2025 : Perspektif Grindle Dan Edward III” 4 (2026): 5884–96.

OCDE. *Government at a Glance 2025. Government at a Glance*. Vol. 2025, 2025. https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2025_0efd0bcd-en.html.

Pendidikan, Katalis, Jurnal Ilmu, Alfian Khadafi, Siti Qomariyah, Doa Fajarwati, Alamat Jln, Lio Bandongan, and Citamiang Kota. “Perencanaan Wajib Belajar 12 Tahun Institut Madani Nusantara , Indonesia Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Indonesia Merupakan Langkah Strategis Pemerintah Definisi Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Tiap Masing-Masing Negara . Wajib Belajar Di Masing-Masi” 2 (2025).

Pendidikan, Kementerian, D A N Kebudayaan, Pusat Penelitian, Kebijakan Pendidikan,

and D A N Kebudayaan. “Kebijakan Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020,” 2020.

Radja, Ivana Grace Sofia, Leo Sunjaya Sunjaya, and Yohan Eka Wahyunda. “Kualitas Pendidikan Di Daerah Pedesaan, Studi Kasus Desa Rowotamtu Dan Tisnogambar.” *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2023): 296–310. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i4.1876>.

Sari, Dwi Wulan, and Qolbi Khoiri. “Pendidikan Untuk Semua : Studi Pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun” 05, no. 03 (2023): 9441–50.

Strategis, Rencana. “Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Rencana Strategis 2020-2024,” 2024.

Tarditi, Valeria. “Policy Framing and Party Competition: The Italian Political Debate on Local Public Services since the Economic Crisis.” *Partecipazione e Conflitto* 13, no. 1 (2020): 633–64. <https://doi.org/10.1285/i20356609v13i1p633>.

Vinet, Luc, and Alexei Zhedanov. “A ‘missing’ Family of Classical Orthogonal Polynomials.” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 1–14. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

Wardani, Kristi, and Siti Irene Dwiningrum. “Studi Kasus: Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Seruma.” *WACANA AKADEMIKA: Majalah Ilmiah Kependidikan* 5, no. 1 (2021): 69. <https://doi.org/10.30738/wa.v5i1.6409>.

Wiratno, Budi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 26, no. 1 (2016): Hlm 28-34.

Policy Framework on Sound Public Governance. Policy Framework on Sound Public Governance, 2020. <https://doi.org/10.1787/c03e01b3-en>.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-576/Un.08/FISIP.L05/03/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Singkil

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802091

Nama : M.ALDI MUNTHE

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : JALAN TEUKU UMAR SIAGA SUBULUSSALAM UTARA

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI KEGIATAN WAJIB BELAJAR DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Banda Aceh, 25 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 31 Juli 2026

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS WILAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
Jalan Pendidikan Nomor 1 Ketapang Indah, Singkil Utara, Aceh Singkil. Kode Pos 24785
e-mail : cdp.sas19@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/V/116/2026

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Singkil dengan ini menerangkan:

Nama : M. ALDI MUNTHE
NIM : 220802091
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Berdasarkan surat perintah Nomor: 100.3.5/V/101/2026, telah selesai melakukan penelitian Ilmiah di Satuan Pendidikan.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Kabupaten Aceh Singkil



HANDOKO, SP., M.Eng
PENATA TINGKAT I
NIP. 19780201 200504 1 001



DinasPendidikan Aceh



@Dinaspendidikan



@dsdkaacehprov

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

A. Informan Dinas Pendidikan Dan Cabang Dinas Pendidikan

Dimensi Efektivitas

1. Bagaimana pelaksanaan Program Wajib Belajar di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Apakah tujuan program telah tercapai sesuai target?
3. Apakah angka putus sekolah mengalami penurunan?
4. Bagaimana hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program?
5. Apakah program telah menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil?
6. Apa dampak program terhadap peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan?

Dimensi Kecukupan

1. Apakah sumber daya manusia yang tersedia mencukupi untuk melaksanakan program?
2. Apakah anggaran yang dialokasikan telah memadai?
3. Apakah bantuan pendidikan yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan peserta didik?
4. Apakah jumlah guru dan tenaga kependidikan telah sesuai dengan kebutuhan?
5. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya?
6. Apakah fasilitas transportasi dan akses jalan telah mendukung pelaksanaan program?

Dimensi Responsivitas

1. Apakah ada mekanisme khusus untuk menerima masukan dari masyarakat?
2. Bagaimana Dinas Pendidikan merespons keluhan masyarakat terkait pendidikan?
3. Bagaimana respons Dinas Pendidikan terhadap masalah putus sekolah?
4. Apakah program telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat?
5. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program?
6. Bagaimana respons Dinas Pendidikan terhadap kondisi geografis yang menantang?
7. Apakah ada inovasi yang dilakukan untuk menjangkau daerah terpencil?
8. Bagaimana respons terhadap masalah ekonomi keluarga yang memengaruhi pendidikan anak?

Dimensi Ketepatan

1. Apakah target peserta didik telah tepat sasaran?
2. Apakah bantuan pendidikan telah diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan?
3. Apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan?
4. Apakah prosedur pelaksanaan program telah sesuai dengan SOP?
5. Apakah monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan secara konsisten?

B. Pedoman Wawancara Kepala Sekolah Dan Guru

Dimensi Efektivitas

1. Bagaimana pelaksanaan Program Wajib Belajar di sekolah ini?
2. Apakah target partisipasi peserta didik telah tercapai?

3. Apakah ada peserta didik yang putus sekolah tahun ini?
4. Bagaimana hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan?
5. Apakah program telah menjangkau seluruh peserta didik?
6. Bagaimana efektivitas komunikasi dengan orang tua?

Dimensi Kecukupan

1. Apakah jumlah guru dan tenaga kependidikan telah mencukupi?
2. Apakah jumlah guru dan tenaga kependidikan telah mencukupi?
3. Apakah waktu pembelajaran telah cukup untuk mencapai target?
4. Apakah dukungan teknis dari Dinas Pendidikan telah memadai?
5. Apakah akses transportasi dan kondisi jalan telah mendukung?
6. Apa kekurangan sumber daya yang masih dihadapi sekolah?
7. Apakah pelatihan guru telah mencukupi untuk mendukung program?

Dimensi Responsivitas

1. Bagaimana sekolah merespons masalah peserta didik yang sering tidak hadir?
2. Apakah ada mekanisme untuk menerima masukan dari orang tua?
3. Bagaimana respons sekolah terhadap peserta didik yang berisiko putus sekolah?
4. Bagaimana keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan program?
5. Bagaimana respons sekolah terhadap kondisi ekonomi keluarga?
6. Bagaimana respons terhadap masalah jarak dan transportasi?

Dimensi Ketetapan

1. Apakah bantuan pendidikan telah diberikan kepada yang membutuhkan?
2. Apakah program telah dilaksanakan sesuai perencanaan sekolah?
3. Apakah pembagian tugas guru dan staf telah jelas?
4. Apakah monitoring dan evaluasi internal telah dilaksanakan konsisten?
5. Apakah pelaporan ke Dinas Pendidikan telah tertib?
6. Apakah pendataan peserta didik telah tepat dan akurat?

C. Pedoman Wawancara Peserta Didik

Dimensi Efektivitas

1. Apakah program ini membantu Anda tetap bersekolah?
2. Apakah Anda merasa program ini bermanfaat?
3. Apa dampak program ini terhadap motivasi belajar Anda?
4. Apakah informasi tentang program ini jelas dan mudah dipahami?
5. Apakah Anda mengetahui Program Wajib Belajar?
6. Apakah program ini telah menjangkau semua siswa yang membutuhkan?

Dimensi Kecukupan

1. Apakah bantuan pendidikan yang Anda terima telah cukup?
2. Apakah biaya sekolah masih menjadi beban bagi keluarga Anda?
3. Apakah akses transportasi ke sekolah telah memadai?
4. Apakah kondisi jalan menuju sekolah telah baik?
5. Apa kebutuhan sekolah yang masih sulit dipenuhi?

6. Apa dukungan tambahan yang anda butuhkan dari pemerintah?

Dimensi Responsivitas

1. Apakah sekolah merespon ketika anda mengalami masalah?
2. Bagaimana respons sekolah terhadap kondisi ekonomi keluarga anda?
3. Bagaimana respon sekolah terhadap masalah jarak dan transportasi?
4. Apakah program ini telah disesuaikan dengan kebutuhan anda?
5. Apakah Anda pernah menyampaikan keluhan kepada guru atau sekolah?
6. Bagaimana respons sekolah terhadap masalah Anda?

Dimensi Ketetapan

1. Apakah bantuan pendidikan yang anda terima telah tepat sasaran?
2. Apakah prosedur penerimaan bantuan telah jelas?
3. Apa kendala yang Anda alami dalam mengakses program ini?
4. Apa saran Anda untuk perbaikan program ini?
5. Apakah informasi yang diberikan sekolah telah akurat?

D. Pedoman Wawancara Orang Tua Peserta Didik

Dimensi Efektivitas

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Program Wajib Belajar?
2. Apakah program ini membantu anak Bapak/Ibu tetap bersekolah?
3. Apakah program ini membantu mengurangi angka putus sekolah di lingkungan ini?

4. Apakah informasi tentang program ini jelas dan mudah dipahami?
5. Apa dampak program ini terhadap motivasi belajar anak?

Dimensi Kecukupan

1. Apakah bantuan pendidikan yang diterima anak telah cukup?
2. Apakah biaya sekolah masih menjadi beban bagi keluarga?
3. Apakah akses transportasi ke sekolah telah memadai?
4. Apakah kondisi jalan menuju sekolah telah baik?
5. Apa kebutuhan sekolah yang masih sulit dipenuhi?
6. Apakah informasi dan panduan tentang program telah cukup?
7. Apa dukungan tambahan yang Bapak/Ibu butuhkan dari pemerintah?

Dimensi Responsivitas

1. Apakah Bapak/Ibu pernah menyampaikan keluhan kepada sekolah?
2. Bagaimana respons sekolah terhadap kondisi ekonomi keluarga?
3. Bagaimana respons sekolah terhadap masalah jarak dan transportasi?
4. Apakah Bapak/Ibu merasa didengar oleh sekolah dan pemerintah?
5. Apakah Bapak/Ibu dilibatkan dalam kegiatan sekolah?

Dimensi Ketetapan

1. Apakah monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan dengan baik?
2. Apa kendala yang Bapak/Ibu alami dalam mengakses program ini?
3. Apa saran Bapak/Ibu untuk perbaikan program ini?
4. Apakah bantuan pendidikan yang diterima anak telah tepat sasaran?

Lampiran 3 Dokumentasi



Gambar 9. Wawancara Dengan Pihak Dinas Pendidikan



Gambar 10. Wawancara Dengan Pihak Cabang Dinas Pendidikan



Gambar 11. Wawancara Dengan Kepala Sekolah SMAN 1 Suro



Gambar 12. Wawancara Dengan Guru SMAN 1 Singkohor



Gambar 13. Wawancara Dengan Orang Tua Peserta Didik



Gambar 14. Wawancara Dengan Peserta Didik



Gambar 15. Wawancara Dengan Kepala Sekolah SDN 2 Singkohor



Gambar 16. Wawancara Dengan Guru SMPN 1 Singkohor



Gambar 17. Wawancara Dengan Orang Tua Peserta Didik

Lampiran 4 Hasil Observasi

No	Program	Hasil Observasi	Status	Keterangan
1.	Sosialisasi program wajib belajar	Ditemukan sosialisasi melalui spanduk, baliho, pertemuan, dan komunikasi dengan masyarakat.	Belum Optimal	Sudah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya menjangkau dan dipahami seluruh masyarakat.
2.	Pemberian bantuan pendidikan	Terdapat BOS, program pendidikan tanpa biaya, dan bantuan kepada siswa dari keluarga kurang mampu.	Terlaksana	Bantuan telah disalurkan, namun belum dapat menyelesaikan semua masalah ekonomi keluarga.
3.	Pemerataan akses pendidikan	Sekolah sudah tersedia, namun masih terdapat masalah jarak yang jauh, jalan yang berbatu atau licin, serta tantangan dalam transportasi.	Belum Optimal	Meskipun upaya pemerataan telah dilakukan, akses terhadap pendidikan masih belum sepenuhnya merata
4.	Keterlibatan orang tua	Orang tua yang berperan aktif dalam memberikan dorongan dan menghubungkan pendidikan anak, terutama bagi anak-anak yang berisiko putus sekolah.	Terlaksana	Keterlibatan sudah ada, tetapi belum semua orang tua memberikan dukungan yang sama.
5.	Pemerataan layanan pendidikan	Pemerintah berupaya menyediakan layanan pendidikan, namun kondisi geografis dan akses tetap menjadi kendala.	Belum Optimal	Tujuan pemerataan belum sepenuhnya terwujud, terutama di wilayah terpencil dan pesisir.